

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Definisi Pemerintah Daerah berdasarkan UU N0.12 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2), Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD RI tahun 1945. Pemerintahan Daerah memiliki 16 kewenangan, namun urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama menjadi mewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan mengedepankan kemandirian daerah. Adanya desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan daerah. Mampu mandiri dalam mengelola keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Barata (2004), yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah *ekuitas* dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara bertanggung jawab dan nyata. Salah satu tujuan dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002).

Pendapatan Asli Daerah sepuluh provinsi di Sumatera mengalami kenaikan setiap tahunnya. Provinsi Sumatera Utara dan Riau menjadi Provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi. PAD Sumatera Utara tahun 2012 mencapai Rp1.909.632.748.000 dan PAD Riau tahun 2012 mencapai Rp 1.240.840.688.000. PAD terendah tahun 2012 adalah provinsi Bengkulu mencapai Rp 195.615.165.000

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan yang tergambar dalam *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). PDRB yang diperoleh semakin besar akan semakin besar

pula potensi penerimaan daerah. Dengan adanya peningkatan PDRB akan mengindikasikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Saragih, 2003).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau Sumatera memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari tahun ke tahunnya, sehingga arah perekonomian daerah jelas. *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. PDRB sepuluh provinsi di Sumatera mengalami kenaikan setiap tahunnya. Provinsi dengan PDRB tertinggi tahun 2012 adalah Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp 134.463.949.300.000. Sedangkan posisi terendah adalah Provinsi Bengkulu yang hanya Rp 9.464.274.230.000.

Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan, peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Belanja tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dari sepuluh provinsi di Sumatera. Tahun 2012 Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan pengeluaran tertinggi mencapai Rp 8.757.320.000.000 diikuti Sumatera Utara Rp 7.633.634.000.000,

dan Riau dengan Rp 6.670.764.000.000 untuk total belanja pemerintah terkecil yaitu Bangka Belitung hanya Rp 1.332.039.000.000

Menurut Smith dalam Santosa dan Rahayu (2005) Menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Santosa dan Rahayu (2005), penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga meningkat.

Perkembangan jumlah penduduk di sepuluh provinsi di Sumatera mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Persebaran jumlah penduduk terbesar tahun 2012 ada di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk mencapai 13.255.570 jiwa. Provinsi Sumatera Selatan dengan 7.728.150 jiwa. Provinsi dengan jumlah penduduk terkecil adalah Provinsi Bangka Belitung dengan total 1.302.880 jiwa.

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam transportasi darat. Jalan berfungsi sebagai penghubung satu wilayah dan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastruktur yang paling berperah dalam perekonomian nasional. Besarnya mobilitas ekonomi tahun 2002 melalui jaringan jalan nasional dan provinsi rata – rata perhari dapat mencapai 201 juta kendaraan per kilometer

Bappenas dalam Kenastri (2007). Hal ini belum termasuk mobilitas ekonomi yang menggunakan jaringan jalan kabupaten sepanjang 240 ribu kilometer serta jaringan jalan desa. Artinya infrastruktur jalan jelas memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional.

Panjang panjang di sepuluh provinsi di pulau Sumatera mengalami pertumbuhan Panjang jalan setiap tahunnya. Walaupun tidak terlalu signifikan namun tetap mengalami penambahan panjang jalan. Tahun 2012 Provinsi Sumatera Utara memiliki panjang jalan terpanjang dengan total panjang jalan 36.697 kilometer. Provinsi Riau dengan 24.530 kilometer. Provinsi Kepulauan Riau total panjang jalannya hanya 4.521 kilometer.

Berdasarkan latar belakang diatas, melihat pulau Sumatera periode 2009-2012 terjadi fenomena peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepuluh Provinsi di Sumatera. Oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Panjang Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepuluh Provinsi di Sumatera tahun 2009-2012. Penelitian ini akan menggunakan metode panel, yaitu penggabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Untuk mengolah data panel menggunakan metode regresi data panel.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sepuluh provinsi di Sumatera.
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sepuluh provinsi di Sumatera.
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sepuluh provinsi di Sumatera.
4. Bagaimana pengaruh Panjang Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sepuluh provinsi di Sumatera.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sepuluh provinsi di Sumatera.
2. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sepuluh provinsi di Sumatera.
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sepuluh provinsi di Sumatera.
4. Menganalisis pengaruh Panjang Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sepuluh provinsi di Sumatera.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis, untuk mengaplikasikan Teori dalam dunia nyata.
2. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan dan pembangunan di Sumatera.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan periode sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

Isi dari Pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori.

Kajian Pustaka merupakan pengkajian dari hasil hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sedangkan landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

3. Bab III Metode Penelitian.

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan cara mengumpulkan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Analisis .

Dalam bab ini terdapat dua subbab yaitu deskripsi data penelitian yang berupa pemaparan data yang digunakan dalam penelitian dan hasil serta analisis yang merupakan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisisnya.

5. Bab V Simpulan dan Implikasi.

Simpulan merupakan simpulan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Implikasi merupakan hasil dari simpulan dan digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

